

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI DI BANTEN: STUDI KASUS PADA PEMILU 2024

Eko Supriatno¹, Achmad Rozi²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mathla'ul Anwar Banten.

²Program Studi Manajemen, Universitas Primagraha

Email: ekosupriatno83@gmail.com, enggus.eroy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partai politik dalam memperkuat demokrasi di Banten, dengan fokus pada Pemilu 2024. Partai politik memiliki peran sentral dalam mempengaruhi kualitas demokrasi melalui mekanisme rekrutmen politik, partisipasi pemilih, dan kebijakan yang diambil selama pemilu. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengkaji dinamika politik di Banten, menggali peran partai politik dalam menentukan arah politik daerah tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan yang dihadapi partai politik di Banten, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan kelembagaan partai dalam memperbaiki praktik demokrasi lokal di masa depan.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pemilu 2024, Kelembagaan, Banten.

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia, khususnya di Banten, telah mengalami transformasi yang signifikan sejak era reformasi 1998. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik dalam proses politik, termasuk pemilu, yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi di suatu daerah. Dalam konteks ini, partai politik memainkan peran yang sangat penting sebagai lembaga perantara yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Sebagai aktor utama dalam proses pemilu, partai politik berfungsi untuk merepresentasikan berbagai kepentingan, menyusun kebijakan publik, dan memfasilitasi proses rekrutmen politik (Joko Widodo, 2022).¹

¹ Joko Widodo. (2022). Waktunya Pemilu 2024 Demokrasi Gagasan, Bukan Demokrasi Pengkultusan. Siaran Pers Nomor: PR/42/VIII/2022. Jakarta: Lemhannas RI. Tanggal: 9 Agustus 2022

Namun, meskipun memiliki peran yang fundamental, partai politik di Indonesia, termasuk di Banten, masih menghadapi berbagai tantangan serius yang menghambat kualitas demokrasi. Salah satu tantangan utama adalah deideologisasi, di mana partai-partai politik semakin mengedepankan pragmatisme politik daripada nilai-nilai ideologi yang seharusnya menjadi landasan perjuangan politik mereka. Hal ini berkontribusi pada penguatan oligarki internal dalam partai, di mana kepemimpinan cenderung terkonsentrasi pada sekelompok kecil elit partai, yang mengurangi ruang bagi kader-kader muda dan berpotensi mengurangi kualitas representasi politik yang ada Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, nd).²

Selain itu, partai politik juga sering kali menghadapi kritik terkait kurangnya transparansi dalam proses internal mereka. Pemilu 2024 di Banten menjadi momen penting untuk mengevaluasi sejauh mana partai politik dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Banten, sebagai salah satu provinsi yang memiliki dinamika politik yang cukup kompleks, dengan berbagai kekuatan politik lokal yang saling berinteraksi, menawarkan gambaran yang menarik untuk mengkaji peran partai politik dalam memperkuat demokrasi lokal (Supriatno, Eko, nd)³

Partai politik di Banten, baik yang berkuasa maupun yang berada di luar pemerintahan, memiliki peran strategis dalam menentukan arah politik provinsi ini. Pemilu 2024 menjadi kesempatan bagi partai-partai tersebut untuk membuktikan kemampuannya dalam menghadapi tantangan politik, serta mengoptimalkan fungsi-fungsi demokrasi yang mereka emban. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang dinamika peran partai politik di Banten selama Pemilu 2024, dengan fokus pada tiga aspek utama: rekrutmen politik, partisipasi publik, dan pengambilan kebijakan (Komisi Pemilihan Umum, nd)⁴

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi peran partai politik di Banten. Melalui metode studi kasus, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana partai-partai politik di Banten berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintah, serta bagaimana mereka dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional (Firman Wijaya, nd)⁵. Penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh partai politik di Banten, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk penguatan kelembagaan partai dan praktik demokrasi di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang besar, baik untuk kajian ilmu politik di tingkat lokal maupun nasional, serta untuk pengembangan kebijakan yang dapat mendukung penguatan demokrasi melalui peran partai politik yang lebih efektif. Sebagai kontribusi terhadap pemahaman demokrasi lokal, hasil dari penelitian ini

² Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. (nd). Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu. Nakhoda

³ Supriatno, Eko. (nd). Proses Kandidasi di Pilgub Banten 2024: Ruang Gelap yang Penuh Misteri. Radar Bangsa.

⁴ . Komisi Pemilihan Umum (KPU). (nd). Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Jakarta: KPU.

⁵ Firman Wijaya. (nd). Pemilu 2024; Obsesi Pemilu Demokratis dan Transisi Demokrasi "Endgame". Bawaslu.

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum dalam upaya memperkuat sistem demokrasi di Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran partai politik dalam memperkuat demokrasi di Banten, khususnya pada Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan memahami kompleksitas fenomena politik yang terjadi di tingkat lokal, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif.

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang konteks politik, dinamika sosial, dan praktik-praktik internal partai politik yang lebih spesifik, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang peran partai politik dalam penguatan demokrasi (Universitas Muhammadiyah Jakarta, nd)

Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara intensif peran partai politik di Banten selama Pemilu 2024. Pemilihan Banten sebagai studi kasus didasarkan pada karakteristik politik provinsi ini yang cukup dinamis, dengan keberagaman aktor politik, serta adanya persaingan antara partai politik lokal dan nasional yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana partai-partai tersebut beroperasi dalam kerangka demokrasi lokal.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan berbagai informan yang terdiri dari politisi yang aktif terlibat dalam Pemilu 2024, pengamat politik, serta masyarakat lokal yang memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam proses politik di Banten. Informan dipilih secara purposive, dengan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman mereka yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan interpretasi informan tentang peran partai politik di Banten, baik dalam proses rekrutmen politik, partisipasi publik, maupun dalam pengambilan kebijakan.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan analisis dokumen sebagai sumber data utama. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi platform partai politik, yang menggambarkan visi, misi, dan kebijakan-kebijakan utama yang diusung oleh partai selama Pemilu 2024. Dokumen kebijakan publik juga dianalisis untuk memahami bagaimana partai politik terlibat dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan isu-isu lokal di Banten. Selain itu, laporan Pemilu 2024 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait juga digunakan untuk memberikan gambaran objektif tentang hasil dan tren pemilu, serta untuk menilai sejauh mana partai politik dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi melalui partisipasi aktif mereka dalam proses pemilu.

Observasi juga dilakukan di beberapa acara kampanye dan forum politik yang melibatkan partai-partai politik di Banten. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai interaksi antara partai politik dan masyarakat, serta untuk mengamati

bagaimana partai politik menyampaikan pesan politik dan memperkuat hubungan dengan konstituen mereka.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari wawancara, dokumen, dan observasi.

Analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan pola-pola dan hubungan yang ada antara tindakan partai politik, respons masyarakat, dan dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil selama Pemilu 2024. Melalui analisis tematik ini, penelitian ini akan dapat menjelaskan bagaimana partai politik berperan dalam memperkuat atau justru melemahkan proses demokrasi di Banten, serta memberikan rekomendasi tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kualitas demokrasi di masa mendatang.

Dengan pendekatan yang holistik ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran partai politik dalam konteks demokrasi lokal, khususnya di Banten, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi penguatan sistem politik di Indonesia secara keseluruhan.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik di Banten menghadapi tantangan besar dalam memperkuat kelembagaan internal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, terutama pada Pemilu 2024. Meskipun beberapa partai politik telah berupaya untuk melakukan reformasi dalam aspek rekrutmen politik dan penguatan struktur organisasi, praktik politik yang pragmatis masih mendominasi di banyak partai. Ketimpangan antara idealisme partai dengan kenyataan di lapangan menyerosoti kesenjangan yang terjadi dalam proses politik di Banten.

Reformasi yang dilakukan beberapa partai politik, seperti peningkatan kualitas rekrutmen politik dan pembenahan struktur organisasi, tidak sepenuhnya berhasil mengatasi masalah deideologisasi dan oligarki internal yang masih terjadi. Beberapa partai politik cenderung lebih mengutamakan strategi kemenangan pemilu dengan pragmatisme politik, tanpa memperhatikan visi dan misi jangka panjang yang dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Hal ini berpengaruh pada kualitas anggota legislatif yang terpilih, yang sering kali tidak dapat menunjukkan komitmen yang kuat terhadap agenda-agenda reformasi politik yang diperlukan untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

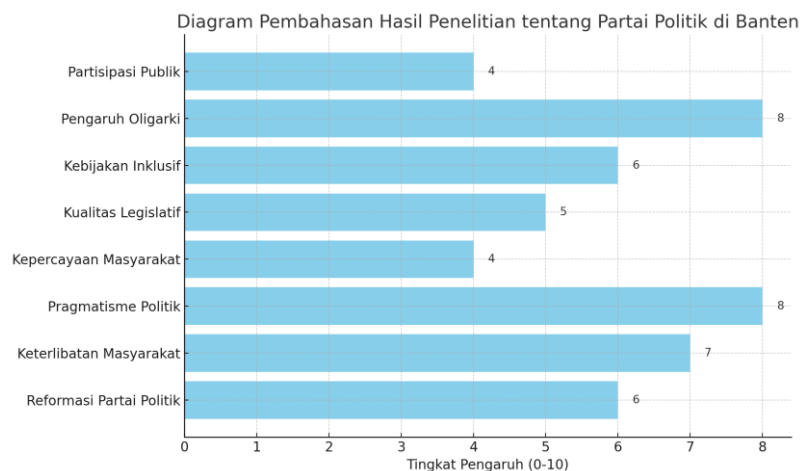
Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Banten juga menunjukkan penurunan yang signifikan. Hasil wawancara dengan masyarakat dan pengamat politik menunjukkan bahwa ketidakmampuan partai politik untuk menjaga integritas dan kualitas calon legislatif menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi persepsi negatif terhadap partai-partai tersebut. Masyarakat cenderung merasa bahwa partai politik lebih fokus pada kepentingan pragmatis dan jangka pendek daripada pada upaya memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas. Banyak responden yang

mengungkapkan kekecewaan terhadap janji-janji politik yang tidak ditepati oleh para politisi yang terpilih melalui partai-partai politik tersebut (Jazilul Fawiad, Dr. H., nd).⁶

Analisis dokumen, termasuk platform partai politik dan kebijakan yang diusung selama Pemilu 2024, mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan lokal, banyak partai yang masih terjebak dalam persaingan antar-elit yang mengabaikan aspirasi rakyat kecil. Hal ini menciptakan jarak antara partai politik dan masyarakat, yang semakin memperburuk tingkat partisipasi publik dalam proses politik. Meski terdapat upaya untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik, pengaruh dari oligarki politik masih mendominasi, sehingga banyak kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok elit tertentu daripada masyarakat luas (Kompas Nasional, nd)⁷.

Hasil observasi dalam kampanye politik dan forum-forum politik di Banten juga menunjukkan adanya kesenjangan antara janji-janji politik yang disampaikan oleh partai-partai politik dengan kenyataan di lapangan. Banyak acara kampanye yang lebih berfokus pada upaya memenangkan suara pemilih, tanpa ada pembahasan substantif mengenai reformasi politik atau penguatan institusi demokrasi. Masyarakat tampak lebih tertarik pada jaminan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu daripada pada diskursus politik yang lebih luas tentang pembangunan daerah dan penguatan demokrasi.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa upaya reformasi yang dilakukan oleh partai-partai politik di Banten, ketimpangan antara idealisme politik dengan praktik politik yang pragmatis, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, menjadi faktor utama yang menghambat partai-partai politik dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Penurunan integritas dan kualitas anggota legislatif yang terpilih juga memperburuk kondisi ini, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kelembagaan internal partai politik dan meningkatkan partisipasi publik agar demokrasi lokal di Banten dapat berkembang lebih baik.



⁶ Jazilul Fawiad, Dr. H. (nd). Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi. Diakses dari MPR RI

⁷ Kompas Nasional. (nd). Profil Singkat Parpol Pemilu 2024: 17 Partai Nasional, 6 Lokal Aceh. Diakses dari Kompas

Diagram di atas secara visual menggambarkan kategori-kategori kunci yang diperoleh dari temuan penelitian mengenai partai politik di Banten. Diagram ini menunjukkan berbagai elemen yang mempengaruhi penguatan demokrasi lokal, seperti reformasi partai politik, keterlibatan publik, pragmatisme dalam politik, kepercayaan publik, kualitas legislatif, kebijakan inklusif, pengaruh oligarki, dan partisipasi publik.

Setiap batang mewakili pengaruh atau dampak dari faktor-faktor ini, dinilai dengan skala dari 0 hingga 10, yang menyoroti kekuatan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga politik di Banten. Penelitian ini menekankan ketidaksesuaian antara reformasi politik ideal dan realitas praktis politik partai, yang berkontribusi pada penurunan kepercayaan dan partisipasi dalam proses politik di wilayah tersebut.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi peran partai politik dalam membangun demokrasi di Banten, terutama dalam konteks Pemilu 2024. Temuan utama penelitian ini menyoroti pentingnya reformasi kelembagaan partai politik dan pendidikan politik berbasis pada nilai-nilai kebangsaan sebagai langkah krusial dalam memperkuat demokrasi lokal (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, nd)⁸.

Pertama, masalah kelembagaan partai politik di Banten mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam sistem demokrasi Indonesia. Partai politik di Banten, meskipun berusaha melakukan reformasi internal, masih menghadapi kendala besar terkait dengan oligarki internal dan deideologisasi. Beberapa partai politik fokus pada pragmatisme politik, terutama dalam rangka meraih kemenangan pemilu, tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kualitas demokrasi. Proses rekrutmen politik yang sering kali tidak transparan, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap anggota partai, berimplikasi pada terpilihnya calon legislatif yang kurang memiliki komitmen terhadap reformasi politik dan pembangunan daerah. Hasil wawancara dengan beberapa politisi dan pengamat politik juga mempertegas bahwa struktur internal yang masih kental dengan kepentingan elit, sering kali menghalangi terbentuknya kader-kader politik yang memiliki integritas tinggi dan misi yang jelas untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

Pentingnya reformasi kelembagaan ini tidak hanya berkaitan dengan perbaikan struktur organisasi, tetapi juga dengan kualitas dan kapasitas kader-kader partai. Dalam Pemilu 2024, partai politik di Banten dituntut untuk menyediakan ruang bagi kader-kader yang memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partai politik lebih sering memprioritaskan keterpilihan dalam pemilu ketimbang kualitas calon legislatif. Hal ini

⁸ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. (nd). Refleksi Kelembagaan Politik Formal Partai dan Pemilu Era Reformasi: Perubahan dan Keberlanjutan. Diakses dari FISIP UI.

menciptakan kesenjangan antara harapan masyarakat dengan hasil yang dicapai dalam proses politik.

Selain itu, pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan dan karakter menjadi aspek penting dalam membentuk calon legislatif yang tidak hanya kompeten dalam hal kebijakan publik, tetapi juga memiliki integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan (Kesbangpol Magelang Kota, 2023)⁹. Pendidikan politik yang lebih mengedepankan karakter, bukan hanya kepentingan praktis atau elektoral, dapat membantu membangun budaya politik yang lebih sehat dan mengurangi praktik politik yang pragmatis. Oleh karena itu, partai politik harus lebih serius dalam mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan, etika politik, dan pemahaman kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat dalam pendidikan kadernya.

Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Banten yang semakin menurun juga menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap janji-janji politik yang tidak ditepati. Penurunan kepercayaan ini disebabkan oleh ketidakmampuan beberapa partai politik dalam menjaga kualitas dan integritas anggota legislatif yang mereka calonkan. Banyak partai politik lebih fokus pada kemenangan pemilu dan keuntungan jangka pendek, alih-alih membangun kepercayaan jangka panjang dengan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa suara mereka sering kali tidak diperhatikan setelah pemilu selesai, yang berimbas pada rendahnya partisipasi politik di tingkat lokal.

Lebih lanjut, analisis terhadap platform partai politik dan kebijakan yang diusung selama Pemilu 2024 menunjukkan bahwa meskipun beberapa partai berusaha menawarkan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan lokal, masih banyak yang terjebak dalam konflik antar-elit politik. Hal ini menciptakan jarak yang semakin besar antara partai politik dan masyarakat, terutama di kalangan kelompok-kelompok marginal yang tidak merasa terwakili dengan baik dalam kebijakan yang ditawarkan. Upaya perbaikan kebijakan publik yang dilakukan oleh beberapa partai sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat banyak, melainkan lebih mengutamakan keuntungan politik bagi segelintir elit.

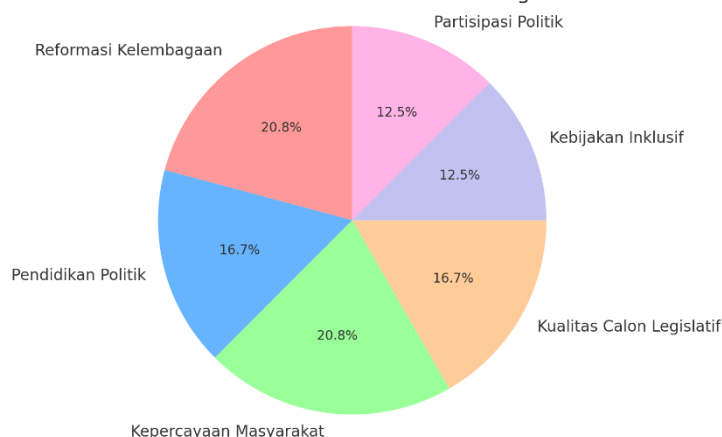
Observasi pada acara kampanye dan forum politik di Banten juga memperlihatkan kesenjangan antara janji-janji politik yang disampaikan oleh partai politik dan kenyataan di lapangan. Kampanye lebih berfokus pada retorika politik dan pencitraan, tanpa menawarkan pembahasan yang substantif mengenai isu-isu demokrasi, pembangunan daerah, atau reformasi politik. Interaksi antara partai politik dan masyarakat sering kali berpusat pada upaya memenangkan suara, bukannya menciptakan dialog politik yang berkelanjutan tentang masa depan daerah.

⁹ Kesbangpol Magelang Kota. (2023). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik. Diakses dari Kesbangpol Magelang.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi di Banten mengalami perkembangan, partai politik masih kesulitan dalam menjembatani antara praktik politik dan aspirasi masyarakat yang lebih luas (Suko Wiyono, nd).¹⁰

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa meskipun ada upaya reformasi dalam tubuh partai politik di Banten, kesenjangan antara idealisme politik dan praktik politik yang pragmatis masih menjadi hambatan besar dalam memperkuat demokrasi lokal. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Banten, diperlukan reformasi kelembagaan yang lebih mendalam, peningkatan kualitas pendidikan politik, serta usaha untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Partai politik di Banten harus mampu mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, berorientasi pada kepentingan rakyat, dan dapat menjaga integritas serta kualitas calon legislatif yang dihasilkan.

Diagram Pembahasan Peran Partai Politik dalam Membangun Demokrasi di Banten



Di atas adalah diagram pembahasan yang menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi peran partai politik dalam membangun demokrasi di Banten berdasarkan hasil penelitian. Berikut adalah penjelasan untuk setiap kategori dalam diagram:

- 1) Reformasi Kelembagaan (5): Menyoroti pentingnya perubahan struktural dalam partai politik untuk memperkuat kapasitas dan integritas kader serta mewujudkan demokrasi yang lebih baik.
- 2) Pendidikan Politik (4): Mencakup pembentukan kader yang tidak hanya kompeten dalam kebijakan publik, tetapi juga memiliki karakter yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
- 3) Kepercayaan Masyarakat (5): Menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik akibat janji-janji yang tidak ditepati dan integritas yang rendah dari calon legislatif yang terpilih (Wikipedia, nd).¹¹

¹⁰ Suko Wiyono. (nd). Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024. As-Syifa: Jurnal Kajian dan Sejarah Islam. Diakses dari As-Syifa.

¹¹ Wikipedia. (nd). Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2024. Diakses dari Wikipedia.

- 4) Kualitas Calon Legislatif (4): Menekankan pentingnya kualitas calon legislatif yang lebih mengutamakan integritas dan kemampuan dalam mewakili kepentingan rakyat.
- 5) Kebijakan Inklusif (3): Memperlihatkan upaya partai politik untuk menawarkan kebijakan yang lebih inklusif namun sering kali terhambat oleh konflik antar-elit.
- 6) Partisipasi Politik (3): Menyiratkan bahwa rendahnya partisipasi politik masyarakat disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilu dan rendahnya kepercayaan terhadap partai politik.

Diagram ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan dan pendidikan politik memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Banten, sementara kebijakan inklusif dan partisipasi politik masih perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partai politik di Banten memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi lokal, khususnya dalam konteks Pemilu 2024. Partai politik bukan hanya berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memengaruhi kualitas demokrasi melalui mekanisme rekrutmen politik, partisipasi pemilih, dan kebijakan yang diambil selama pemilu. Namun, meskipun memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penguatan demokrasi, partai politik di Banten masih menghadapi berbagai tantangan serius dalam mengelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas kader.

Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan antara idealisme yang diusung oleh banyak partai politik dan realitas pragmatis yang terjadi di lapangan. Meskipun beberapa partai politik di Banten telah berusaha melakukan reformasi kelembagaan melalui penguatan struktur organisasi dan perbaikan sistem rekrutmen politik, masih banyak yang terjebak dalam praktik politik yang lebih mengutamakan kemenangan jangka pendek dibandingkan pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Kelemahan dalam rekrutmen politik, di mana banyak calon legislatif yang terpilih tidak memenuhi kriteria kualitas dan integritas, memperburuk citra partai politik di mata masyarakat dan mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem politik yang ada.

Untuk itu, diperlukan reformasi yang lebih mendalam dalam tubuh partai politik, yang meliputi penguatan ideologi yang jelas, perbaikan dalam sistem rekrutmen politik yang lebih transparan dan akuntabel, serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengelola internal partai dengan lebih profesional. Reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas kader partai, tetapi juga membantu mengurangi dominasi oligarki politik yang masih menghambat terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Partai politik di Banten perlu memastikan bahwa proses seleksi calon legislatif dilakukan dengan lebih teliti, dengan mengutamakan kapasitas, komitmen, dan integritas calon yang akan mewakili rakyat.

Selain itu, pendidikan politik harus menjadi prioritas utama dalam upaya memperbaiki kualitas kader partai. Pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan, etika politik, dan penguatan karakter. Oleh karena itu, partai politik di Banten harus berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan bela negara dalam proses pendidikan dan pembinaan kader, agar mereka dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya cakap dalam bidang politik, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab terhadap pembangunan daerah dan penguatan demokrasi.

Secara keseluruhan, meskipun tantangan yang dihadapi partai politik di Banten dalam memperkuat demokrasi cukup besar, terdapat peluang untuk memperbaiki sistem kelembagaan dan meningkatkan kualitas kader melalui reformasi yang mendalam dan pendidikan politik yang lebih baik. Dengan melakukan reformasi kelembagaan yang terarah dan berbasis pada prinsip-prinsip demokrasi yang lebih solid, partai politik di Banten dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di daerah ini. Sebagai kesimpulan, penguatan partai politik melalui perbaikan internal dan pendidikan politik yang berbasis pada nilai kebangsaan dan karakter adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Banten dan Indonesia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. (nd). *Refleksi Kelembagaan Politik Formal Partai dan Pemilu Era Reformasi: Perubahan dan Keberlanjutan*. Diakses dari <http://www.fisip.ui.ac.id/>.
2. Jazilul Fawiad, Dr. H. (nd). *Pemilu 2024 Sebagai Momentum Konsolidasi Demokrasi*. Diakses dari <https://www.mpr.go.id/>.
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU). (nd). *Berikut 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2024*. Jakarta: KPU.
4. Kompas Nasional. (nd). *Profil Singkat Parpol Pemilu 2024: 17 Partai Nasional, 6 Lokal Aceh*. Diakses dari <https://www.kompas.com/>.
5. Kesbangpol Magelang Kota. (2023). *Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dan Partai Politik*. Diakses dari <https://kesbangpol.magelangkota.go.id/>.
6. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. (nd). *Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu*. Nakhoda.
7. Supriatno, Eko. (nd). *Proses Kandidasi di Pilgub Banten 2024: Ruang Gelap yang Penuh Misteri*. Radar Bangsa.
8. Wikipedia. (nd). *Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2024*. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2024.

9. Firman Wijaya. (nd). *Pemilu 2024; Obsesi Pemilu Demokratis dan Transisi Demokrasi "Endgame"*. Bawaslu.
10. Joko Widodo. (2022). *Waktunya Pemilu 2024 Demokrasi Gagasan, Bukan Demokrasi Pengkultusan*. Siaran Pers Nomor: PR/42/VIII/2022. Jakarta: Lemhannas RI. Tanggal: 9 Agustus 2022.
11. Suko Wiyono. (nd). *Penguatan Fungsi Partai Politik Sebagai Pencegahan Polarisasi Partai Politik Pada Masa Pemilu 2024*. *As-Syifa: Jurnal Kajian dan Sejarah Islam*. Diakses dari <http://as-syifa.or.id/>.